

**ANALISIS KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 439 K/PID/2010  
ATAS TUDUHAN PENIPUAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM  
NOTARIS**

**EVA ARTHA SITANGGANG**

**ABSTRACT**

*A notary who runs the office of notary can not be punished by or under the act of doing so by law, namely committing mengkonstatir purpose / intention of the parties that require a legal action they do can be proved by authentic act, as long as the implementing office has followed procedures prescribed by the Act (see in particular Article 16 and Article 17 of Law No. 30 of 2004 relating to the obligations and restrictions.*

*Notary deeds which can be classified as a criminal act of fraud is the act of using a fake name (naam valsche), using dignity/false position (valsche hoedanigheid), using the ruse (listige kunstgreoen) and a series of lies (zamenweefsel van verdichtsels). The consideration of the Supreme Court in the Ruling No. 439 K/Pid/2010 on charges of fraud committed by the Notary is accused BN has violated the provisions of Article 378 of the Criminal Code jo. Article 55 paragraph (1) to 1 of the Criminal Code. Protection for the notary on charges of criminal fraud in their official duty is A Notary can not be held criminal liability on the deed he made when he was doing his duty in accordance with the laws and regulations relating to its duties as a notary, it is legitimized in Article 266 the Criminal Code. A notary can not be convicted of criminal on Article 266 of the Criminal Code because it has done its job properly. The position of a Notary Public in Article 266 of the Penal Code is the one who told (manus ministra), and in the criminal law, a person who is asked for doing something cannot be asked for his responsibility for what he has done.*

*Keywords: Notary, Responsibility for position, Fraud.*

**I. Pendahuluan**

Tugas pokok Notaris dalam hal membuat akta otentik, yang menurut Pasal 1870 KUHPerdata akta otentik itu memberikan kepada pihak-pihak yang membuatnya suatu pembuktian yang mutlak. Notaris oleh undang-undang diberi wewenang untuk menciptakan alat pembuktian yang mutlak, dalam pengertian bahwa apa yang tersebut dalam akta otentik itu pada pokoknya dianggap benar.

Dalam prakteknya Notaris sering dilibatkan jika terjadi perkara antara para pihak, padahal sengketa yang terjadi bukanlah antara para pihak dengan Notaris mengingat Notaris bukan pihak dalam akta yang dibuatnya, namun Notaris sering harus berurusan dengan proses hukum baik di tahap penyelidikan, penyidikan maupun persidangan untuk mempertanggungjawabkan akta yang dibuatnya.

Tetapi, tidak dapat dipungkiri, bahwa ada kalanya Notaris dalam melakukan pembuatan akta juga dapat melakukan suatu kesalahan atau kelalaian.

Salah satu kasus penjatuhan sanksi pidana kepada Notaris tampak dalam perkara kasus penipuan yang dituduhkan pada BN, Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Dumai, Propinsi Riau. Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 439 K/Pid/2010 tertanggal 20 Juli 2010, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, permohonan kasasi dari terdakwa Notaris BN ditolak oleh Mahkamah Agung karena terdakwa dianggap telah melakukan perbuatan pidana berupa penipuan yang menimbulkan kerugian bagi AWL dan rekan-rekannya. Kasus penipuan yang dituduhkan kepada Notaris BN bermula ketika seseorang bernama ICHK menawarkan sebidang tanah milik BS seluas 7.150 meter persegi dengan harga 400 ribu rupiah per meter persegi kepada AWL dan kawan-kawan. ICHK tersebut telah mendapat Surat Kuasa Jual Beli dari pemilik tanah yaitu BS tersebut.<sup>1</sup>

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk-bentuk perbuatan Notaris yang dapat dikelompokkan sebagai tindak pidana penipuan?
2. Bagaimana pertimbangan Mahkamah Agung dalam putusan No. 439 K/Pid/2010 atas tuduhan penipuan yang dilakukan oleh Notaris?
3. Bagaimana perlindungan hukum bagi Notaris atas tuduhan penipuan yang dilakukan Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya?

Sesuai dengan permasalahan tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk perbuatan Notaris yang dapat dikelompokkan sebagai tindak pidana penipuan.
2. Untuk mengetahui benar atau tidaknya pertimbangan Mahkamah Agung dalam putusan No. 439 K/Pid/2010 atas tuduhan penipuan yang dilakukan oleh Notaris.
3. Untuk perlindungan hukum bagi Notaris atas tuduhan penipuan yang dilakukan Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

---

<sup>1</sup> Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Agung Nomor 439 K/Pid/2010 tanggal 20 Juli 2010, hlm.3-10.

## **II. Metode Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari:<sup>2</sup>

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan ketentuan jabatan dan kode etik Notaris di Indonesia.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil seminar, hasil karya dari para ahli hukum, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan masalah tuduhan tindak pidana penipuan yang dilakukan Notaris.
3. Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, surat kabar, makalah yang berkaitan dengan objek penelitian.

## **III. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **A. Perbuatan Notaris Yang Dapat Dikelompokkan Sebagai Tindak Pidana Penipuan**

Seorang Notaris dapat dipidanakan apabila dapat dibuktikan secara mendalam dengan mencari unsur kesalahan atau kesengajaan dari notaris yang merupakan suatu tindakan tanpa dasar hukum yang harus dipertanggungjawabkan. Untuk kepentingan pembuktian tersebut, maka diperlukan keterangan dari Notaris oleh penyidik disamping itu untuk menghindari terjadinya kesalahan dakwaan tersebut, maka diperlukan kehadiran Notaris dalam pemeriksaan pidana. Dengan kehadiran Notaris dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan, sampai dengan persidangan, kiranya dapat membantu para penegak hukum untuk membuktikan apakah Notaris terlibat dalam tindak pidana yang dipersangkakan ataukah hanya berakibat pada akta yang dibuat yaitu hanya mempunyai kekuatan pembuktian

---

<sup>2</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm.53.

sebagai akta dibawah tangan atau menjadi batal demi hukum sebagaimana ketentuan Pasal 84 UUJN.<sup>3</sup>

Faktor yang menyebabkan Notaris diperlukan kehadirannya dalam pemeriksaan perkara pidana apabila akta yang dibuat oleh Notaris menimbulkan kerugian yang diderita para pihak maupun pihak lain dan berdasarkan bukti awal bahwa Notaris patut diduga turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, berkaitan dengan kewenangan Notaris berdasarkan Pasal 15 UUJN yaitu membuat akta otentik dengan adanya unsur-unsur tindak pidana seperti :

1. Pasal 55 KUHP yaitu turut serta melakukan tindak pidana;
2. Pasal 231 KUHP yaitu membantu pelaku dalam melakukan kejahatan;
3. Pasal 263 KUHP yaitu membuat surat palsu;
4. Pasal 266 KUHP yaitu memberikan keterangan palsu dalam akta otentik;
5. Pasal 372 KUHP yaitu penggelapan;
6. Pasal 378 KUHP yaitu penipuan;
7. Pasal 385 KUHP yaitu menjual, menukarkan atau membebani dengan *credietverband* (sekarang Hak Tanggungan) atas tanah yang belum bersertifikat

**B. Pertimbangan Mahkamah Agung Dalam Putusan No. 439 K/Pid/2010 Atas Tuduhan Penipuan Yang Dilakukan Oleh Notaris**

Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi ) tidak salah menerapkan hukum dalam amar putusannya, karena dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut tidak melakukan kekeliruan dengan alasan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) tersebut telah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri) dan Terdakwa juga mempunyai peranan yang cukup besar dalam perkara ini sebagaimana yang telah dituangkan dalam surat tuntutan Pemohon Kasasi II/Jaksa/Penuntut Umum tertanggal 18 Mei 2009.

---

<sup>3</sup> Agustining, *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Dibuat dan Berindikasi Pidana*, Tesis, (Medan: Magister Kenotariatan FH USU, 2009), hlm.87.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum yaitu telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) f KUHP.

Berdasarkan pertimbangan Mahkamah Agung tersebut, tampak bahwa alasan-alasan yang diajukan Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum bahwa pengadilan tinggi tidak salah menerapkan hukum dalam amar putusannya karena dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut tidak melakukan kekeliruan dengan alasan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) tersebut telah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri) dan Terdakwa juga mempunyai peranan yang cukup besar dalam perkara ini, menurut Mahkamah Agung alasan yang benar dalam putusan pemidanaan harus memuat pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan yang diajukan Mahkamah Agung berpendapat:

1. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum yaitu telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar yaitu penipuan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan menimbulkan kerugian bagi AWL dan kawan-kawan sebesar Rp.2.860.000.000,- (dua milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah) merupakan perbuatan pidana.
2. Bahwa penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak di terapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah

Pengadilan telah melampaui batas wewenanganya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981).

3. Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ditolak, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa.

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Mahkamah Agung dalam putusannya menyatakan bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum yaitu telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) f KUHP, dan telah mempertimbangan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar yaitu penipuan yang dilakukan oleh terdakwa BN dan menimbulkan kerugian bagi AWL dan kawan-kawan sebesar Rp.2.860.000.000,- (dua milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah) merupakan suatu perbuatan pidana.

Bahwa alasan-alasan yang diajukan pemohon kasasi mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenanganya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981).<sup>4</sup>

Bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi

---

<sup>4</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 429 K/Pid/2010 tanggal 20 Juli 2010, hlm.62.

dari para Pemohon Kasasi, Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak, karena alasan-alasan sebagaimana diuraikan diatas yang diajukan baik oleh pemohon kasasi I maupun pemohon kasasi II tidak dapat diterima oleh Mahkamah Agung.

Akhirnya Mahkamah Agung memutuskan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II Jaksa/ Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Dumai tersebut. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I /Terdakwa BN tersebut, membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

### **C. Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Menjalankan Tugas dan Wewenangnya**

Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan profesinya di bidang pelayanan jasa hukum kepada masyarakat dipayungi oleh undang-undang, dalam undang-undang jabatan Notaris tersebut, Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan, demi tercapainya kepastian hukum.

Undang-undang jabatan Notaris telah memberikan suatu prosedur khusus dalam penegakan hukum terhadap Notaris perlindungan hukum terhadap Notaris dituangkan dalam Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris yang menetapkan, bahwa untuk proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang untuk mengambil fotokopi minuta akta dan atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan dengan Persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD). Kemudian MPD melaksanakan rapat pleno dan hasil rapat tersebut dapat dijadikan penyidik sebagai dasar melakukan pemanggilan. Hanya saja ketentuan Pasal 66 UUDN tersebut dibatalkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 49/PUU-X/2012 tanggal 28 Mei 2013.

Pembatalan ketentuan Pasal 66 UUDN oleh Mahkamah Konstitusi tersebut karena banyak terjadinya perbuatan-perbuatan yang melanggar kode etik yang sebelumnya selalu berlandung pada ketentuan Pasal 66 UUDN tersebut, yaitu untuk memanggil seorang Notaris, penyidik diharuskan meminta izin secara resmi kepada Majelis Pengawas Notaris. Untuk menindak Notaris nakal seharusnya UU

Jabatan Notaris memuat ketentuan pidana khusus bagi Notaris jika melanggar jabatan. Baik itu pidananya berupa denda, kurungan atau penjara sebab Notaris bertugas membuat akta. Dengan akta itu, Notaris bisa menyebabkan seseorang hilang hak. Kalau hak orang hilang, otomatis masyarakat akan dirugikan karena itu perilaku Notaris perlu diawasi.

Sesuai dengan Pasal 70 ayat 1 UUN majelis pengawas berwenang menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran kode etik. Berdasarkan ketentuan tersebut harus diartikan bahwa sebagaimana Majelis Pengawas Notaris merupakan organ penegak hukum yang satu-satunya berwenang menentukan ada atau tidaknya kesalahan dalam pelanggaran profesi jabatan Notaris. Peranan Majelis Pengawas Notaris untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi Notaris sebagai suatu profesi dari campur tangan pihak manapun termasuk pengadilan dalam menentukan kesalahan Notaris dalam menjalankan jabatannya. Bila Notaris menjadi tersangka/terdakwa maka ia dapat melakukan pembelaan diri bahwa tindak pidana yang dipersangkakan padanya bukan dilakukan oleh Notaris melainkan oleh penghadap berdasarkan keterangan yang diberikannya.

Seorang Notaris tidak bisa diminta pertanggung jawaban pidana atas akta yang dibuatnya bila ia telah melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugasnya selaku notaris. Hal ini dilegitimasi dalam Pasal 266 KUHP. Seorang notaris tidak bisa dihukum pidana atas Pasal 266 KUHP ini karena ia telah menjalankan tugasnya dengan benar. Posisi seorang Notaris pada Pasal 266 KUHP adalah orang yang disuruh (*manus ministra*), dan dalam hukum pidana orang yang disuruh tidak bisa diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya. Sedangkan Seorang Notaris dapat diminta pertanggung jawaban pidana atas akta yang dibuatnya berdasarkan Pasal 263 dan 264 KUHP jika :

1. Notaris mengetahui bahwa pada saat orang yang menghadap kepadanya untuk membuat akta otentik, baik berupa perikatan untuk jual beli atau perikatan lainnya, orang tersebut tidak bisa memenuhi syarat-syarat sahny suatu perikatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun



Notaris tidak mengindahkan syarat-syarat sahnya perikatan tersebut dan tetap membuat akta sesuai yang diminta oleh para penghadap;

2. Notaris mengetahui bahwa pada saat orang yang menghadap kepadanya untuk membuat akta otentik, orang tersebut telah memberikan keterangan-keterangan tidak benar untuk dicantumkan di dalam akta tersebut. Notaris tidak mengindahkannya dan tetap saja membuat Akta otentik tersebut.

Dalam hal ini notaris dan para penghadap telah melakukan penyertaan dalam melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 55 KUHP dan sama-sama bisa diminta pertanggungjawaban pidana sebagai pelaku kejahatan

#### **IV. Kesimpulan Dan Saran**

##### **A. Kesimpulan**

1. Perbuatan Notaris yang dapat dikelompokkan sebagai perbuatan pidana penipuan yaitu tindakan menggunakan nama palsu (*valsche naam*), menggunakan martabat/kedudukan palsu (*valsche hoedanigheid*), menggunakan tipu muslihat (*listige kunstgreoen*) dan rangkaian kebohongan (*zamenweefsel van verdichtfels*), bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menghendaki atau setidaknya mengetahui/menyadari bahwa perbuatannya sejak semula memang ditujukan untuk menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda/memberi hutang/menghapuskan piutang kepadanya (pelaku delik), mengetahui/menyadari bahwa yang ia pergunakan untuk menggerakkan orang lain sehingga menyerahkan suatu benda/memberi hutang /menghapuskan piutang kepadanya itu adalah dengan memakai nama palsu, martabat palsu atau sifat palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan.
2. Pertimbangan Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 439 K/Pid/2010 atas tuduhan penipuan yang dilakukan oleh Notaris adalah terdakwa BN telah melanggar ketentuan Pasal 378 KUHPidana *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana antara lain terhadap unsur-unsur “Barang Siapa” dengan pertimbangan profesi sehari-harinya terdakwa BN sebagai seorang Notaris, tentunya terdakwa mempunyai kemampuan untuk bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, unsur “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain” bahwa Majelis berpendapat dari kata-kata yang

diucapkan oleh terdakwa didepan para saksi yaitu “Pak AWL alias KH tenanglah, saya yang mengurus surat-surat tanah tersebut, karena saya sebagai Notaris PPAT, pokoknya sampai tuntas, beres bos” menyiratkan maksud terdakwa untuk mewujudkan transaksi antara saksi ICHK dengan saksi AWL alias KH, dan unsur “Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” menimbang bahwa saksi ICHK seolah-olah dalam bertindak telah mempunyai kuasa dari pemilik tanah untuk menjualkan tanah itu, namun sesuai dengan fakta yang telah terungkap di persidangan bahwa surat kuasa dari BS sebagai pemilik tanah adalah setelah saksi ICHK dan terdakwa datang dari Jakarta, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan penipuan.

3. Perlindungan bagi Notaris atas tuduhan tindak pidana penipuan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya adalah Seorang Notaris tidak bisa diminta pertanggung jawaban pidana atas akta yang dibuatnya bila ia telah melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugasnya selaku notaris, hal ini dilegitimasi dalam Pasal 266 KUHP. Seorang Notaris tidak bisa dihukum pidana atas Pasal 266 KUHP ini karena ia telah menjalankan tugasnya dengan benar. Posisi seorang Notaris pada Pasal 266 KUHP adalah orang yang disuruh (*manus ministra*), dan dalam hukum pidana orang yang disuruh tidak bisa diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya. Kecuali apabila Notaris yang bersangkutan tidak mengindahkan syarat-syarat sahnya perikatan, serta Notaris mengetahui bahwa penghadap telah memberikan keterangan-keterangan tidak benar untuk dicantumkan di dalam akta tersebut, namun Notaris tidak mengindahkannya dan tetap saja membuat Akta otentik tersebut.

## **B. Saran**

1. Notaris hendaknya menjunjung tinggi harkat dan martabat serta kode etik profesi sehingga terhindar dari pelanggaran-pelanggaran yang dapat merugikan kredibilitas Notaris itu sendiri serta Organisasi Notaris yang menaunginya, sehingga dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya seorang Notaris diharapkan untuk bertindak hati-hati, jujur, seksama, mandiri, tidak

berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

2. Oleh karena Mahkamah Agung dalam proses pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkaitan dengan diterapkan atau tidaknya suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya, mengenai dilaksanakan atau tidaknya cara mengadili sesuai ketentuan Undang-Undang, dan mengenai telah terlampaui atau tidaknya batas wewenang Pengadilan yang bersagkutan, maka para pencari keadilan seharusnya lebih bersikap lebih aktif menunjukkan bukti-bukti yang menguatkan kedudukan sebagai pihak yang beritikad baik dalam proses pembuatan suatu perjanjian pada peradilan tingkat pertama dan tingkat banding.
3. Sebagai pejabat umum yang diberikan kepercayaan untuk mengemban sebagian tugas negara, notaris seharusnya tidak menghalalkan segala cara untuk mencapai keuntungan dari profesinya. Notaris hendaknya benar-benar paham atas tugas, kewenangan dan tanggung jawab yang dibebankan undang-undang kepadanya, oleh karena itu kualitas pelayanan hendaknya selalu ditingkatkan terkait perbuatan hukum yang dilakukan para pihak yang hendak membuat suatu perjanjian di hadapan Notaris/PPAT.

## **V. Daftar Pustaka**

### **A. Buku-Buku**

Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Juritmetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1990.

### **B. Karya Ilmiah**

Agustining. *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Dibuat dan Berindikasi Pidana*. Tesis. Medan: Magister Kenotariatan FH USU. 2009.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Agung Nomor 439 K/Pid/2010 tanggal 20 Juli 2010.